



## Yogya Tinjau Ulang Potensi Pajak Hotel 2015

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta kembali meninjau ulang potensi pajak hotel 2015 setelah peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang larangan pegawai negeri sipil menggelar rapat atau kegiatan di hotel dikeluarkan.

"Ada perubahan pendapatan hotel pascakeluarnya aturan dari kementerian sehingga potensi pajak pun perlu ditinjau ulang," kata Kepala Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerja Sama (P3ADK) Pemerintah Kota Yogyakarta Dandang Subagiono, Senin (9/3).

Dia mengatakan kajian itu juga dilakukan karena Yogyakarta

mengeluarkan moratorium izin pembangunan hotel baru. Menurut dia, kegiatan serupa sudah dilakukan pada 2012 dan diharapkan kegiatan kajian potensi pajak hotel pada tahun ini dapat digunakan untuk menetapkan perkiraan target pajak hotel dalam APBD tahun berikutnya.

P3ADK Pemerintah Kota Yogyakarta menganggarkan dana sekitar Rp149 juta untuk peninjauan ulang potensi pajak hotel pada tahun ini. "Harapannya, pada bulan ini sudah ada pemenang lelangnya sehingga pekerjaan itu bisa segera dimulai," lanjutnya.

Selain melakukan studi potensi pajak hotel, Bagian P3ADK Kota Yogyakarta juga

melakukan sejumlah kajian lain seperti kajian optimalisasi pungutan pajak restoran untuk pedagang kaki lima (PKL), kajian tarif retribusi jasa umum dan kajian tarif retribusi jasa usaha.

Pemerintah menganggarkan dana masing-masing Rp50 juta untuk ketiga kajian itu. "Khusus untuk kajian optimalisasi pungutan pajak restoran pada PKL dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan pungutan pajak restoran di PKL dan solusinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, kajian potensi pajak hotel perlu dilakukan secara rutin agar dike-

tahui secara pasti potensi pajak hotel yang bisa masuk dalam pendapatan asli daerah.

"Jumlah hotel di Yogyakarta berubah sehingga diperlukan kajian untuk mengetahui berapa potensi pajaknya yang bisa dimasukkan sebagai pendapatan asli daerah," katanya.

Upaya untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari pajak hotel dilakukan dengan menerapkan pembayaran pajak elektronik atau e-tax pada tahun ini meskipun belum semua hotel menerapkannya. Pemerintah Kota Yogyakarta manargetkan pendapatan dari pajak hotel sebesar Rp88 miliar tahun ini. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005